

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Sumber Lain

Abi Sarwanto. (2017). *Surat Permohonan Setnov Dianggap “Obstruction of justice.”* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170913165733-32-241493/surat-permohonan-setnov-dianggap-obstruction-of-justice>.

Arfiani, Syofirman Syofyan, dan S. D. (2023). *Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 526.

Ellen S Podgor, Arthur Andersen, L. and M. S. (2005). *Should Materiality be an Element of Obstruction of justice*. *Washburn Law Journal*, 44, 307.

Haris Fadhil. (2018). *Usut Hilangnya Novanto, KPK Gali Kronologi Kecelakaan Tabrak Tiang*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3812044/usut-hilangnya-novanto-kpk-gali-kronologi-kecelakaan-tabrak-tiang>

Markhy S Gareda. (2015). *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*. *Lex Crimen*, 4(1), 136.

- Willa Wahyuni. (2022b). *Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of justice dalam Proses Hukum*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2>
- Willa Wahyuni. (2022a). *3 Bukti Obstruction of justice yang Jerat Ferdy Sambo CS*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350/>
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. PT Softmedia.
- Andi Matalatta. (1987). *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan.
- Arief, B. N. (2012). *Pelengkap Hukum Pidana I*. Pustaka Magister.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan Ke). Kencana.
- Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ermansyah Djaja. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Gialdah Tapiansari B. dan Tien S. Hulukati, "Dasar-Dasar Hukum Pidana". Setara Press: Bandung. 2019
- Hasbullah F. Sjawie. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group.

- Kansil, C. S. T. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka.
- Kurde, N. A. (2005). *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Pustaka Pelajar.
- M. Safa'at. (2002). *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)*. Institute of Economic Science Kediri.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenadia Media Group.
- Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji. (2007). *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Diadit Media.
- Radbruch, G. (1995). *Gustav Radbruch, Strafrecht Criminal Law*. Harvard University Press.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Roeslan Saleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT Rajawali Press.
- Ronny Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. FH Untan Press.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Shinta Agustina dan Saldri Isra. dkk. (2015). *Obstruction of justice*. Themis Book.
- Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Storia Grafika.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghilia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Tongat. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press.

## B. Jurnal

- Abi Sarwanto. (2017). *Surat Permohonan Setnov Dianggap “Obstruction of justice.”* CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170913165733-32-241493/surat-permohonan-setnov-dianggap-obstruction-of-justice>.
- Aniesya Nurmasitoh. (2023). Pengaruh Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 1–8.
- Arfiani, Syofirman Syofyan, dan S. D. (2023). Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 526.
- Budiman, M. (2022). PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PADA, PENCUCIAN UANG HASIL DARI BINARY OPTION BINOMO, PLATFORM. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 18–30.
- Ellen S Podgor, Arthur Andersen, L. and M. S. (2005). Should Materiality be antlement of Obstruction of justice. *Washburn Law Journal*, 44, 307.
- Gialdah Tapiansari Batubara, F. A. (2019). MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM SISWA SEJAK DINI. *Litigasi*, 20(1), 19–56.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.138>
- Markhy S Gareda. (2015). Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001. *Lex Crimen*, 4(1), 136.
- Sumantri, D. (2008). Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. *Jurnal Konstitusi* 2, 2(2).

Susanto, A. F. (2017). GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI METODE PATANJALA. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 51.  
<https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.5>

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### D. Sumber Lain

Abi Sarwanto. (2017). *Surat Permohonan Setnov Dianggap “Obstruction of justice.”* CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170913165733-32-241493/surat-permohonan-setnov-dianggap-obstruction-of-justice>.

Arfiani, Syofirman Syofyan, dan S. D. (2023). *Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 526.

Ellen S Podgor, Arthur Andersen, L. and M. S. (2005). *Should Materiality be an Element of Obstruction of justice*. *Washburn Law Journal*, 44, 307.

Haris Fadhil. (2018). *Usut Hilangnya Novanto, KPK Gali Kronologi Kecelakaan Tabrak Tiang*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3812044/usut-hilangnya-novanto-kpk-gali-kronologi-kecelakaan-tabrak-tiang>

Markhy S Gareda. (2015). *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*. *Lex Crimen*, 4(1), 136.

Willa Wahyuni. (2022b). *Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of justice dalam Proses Hukum*. Hukumonline.Com.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan--unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum--lt634e124548acb/?page=2>

- Willa Wahyuni. (2022a). *3 Bukti Obstruction of justice yang Jerat Ferdy Sambo CS.* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-CS-lt634e09cc30350/>
- Haris Fadhil. (2018). *Usut Hilangnya Novanto, KPK Gali Kronologi Kecelakaan Tabrak Tiang.* Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3812044/usut-hilangnya-novanto-kpk-gali-kronologi-kecelakaan-tabrak-tiang>
- Willa Wahyuni. (2022a). *3 Bukti Obstruction of justice yang Jerat Ferdy Sambo CS.* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-CS-lt634e09cc30350/>
- Willa Wahyuni. (2022b). *Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of justice dalam Proses Hukum.* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan--unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum--lt634e124548acb/?page=2>